

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia. Dengan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke membuat pembangunan Indonesia tidak bisa berjalan dengan maksimal. Pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga kepulauan-pulau terpencil di wilayah Indonesia, lebih tepatnya Indonesia bagian timur. Sehingga ada ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, seperti halnya dengan pulau buru yang masih butuh pembangunan infrastruktur pelabuhan rakyat. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, karena pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik yang selalu berperan.

Pembangunan di Indonesia sendiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih mengedepankan wilayah-wilayah yang padat penduduk yang aksesnya sangat mudah untuk dijangkau, sehingga masalah yang ada pada wilayah-wilayah Indonesia bagian timur sering kali terlupakan oleh pemerintah pusat, selain itu masalah yang ada pada wilayah-wilayah Indonesia bagian timur masih kalah populer dengan isu politik, sosial maupun ekonomi di Indonesia. Sehingga, membuat pemerintah secara tidak sengaja melupakan masalah yang ada di Indonesia bagian timur. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang membuat pembangunan di Indonesia kurang merata.

Terlebih dalam hal Infrastruktur penghubung. Misalnya seperti Jalan Raya, Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan sebagainya.

Pada hakekatnya, pembangunan adalah sebuah proses perubahan dalam hal fasilitas ataupun infrastruktur kearah yang lebih baik berdasarkan norma-norma maupun nilai-nilai tertentu. Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang mencakup seluruh sistem sosial yang ada. Seperti halnya sistem politik, sistem ekonomi, infrastruktur, teknologi, budaya dan lainnya. Dan secara umum, tujuan dari pembangunan adalah untuk menghadirkan dampak yang baik bagi masyarakat atau mempermudah masyarakat dalam konteks mobilisasinya. Selain itu tujuan pembangunan seharusnya menghadirkan sebuah kemajuan, perbaikan dan pertumbuhan untuk masyarakat. Khususnya dalam bidang perekonomiannya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 3, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.<sup>2</sup> Maka dari itu, pembangunan seharusnya menghasilkan sebuah dampak yang nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu kelangsungan kehidupan masyarakat, pembangunan seharusnya menumbuhkan atau meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi dalam setiap aktifitas yang dilakukannya. Jika mengacu pada Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan diatas, proses pembangunan seharusnya sudah direncanakan dengan baik serta perencanaan,

---

<sup>1</sup> Jurnal di akses di <http://digilib.unila.ac.id/982/8/BAB%20II> Tanggal 2 Januari 2019, Pukul 20:00

<sup>2</sup> Peraturan Perundangan lihat di <https://kemenag.go.id> Tanggal 1 Januari 2019, Pukul 18:00

perencanaan yang bertahap yang sangat matang. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan dampak dari suatu proses pembangunan.

Suatu proses pembangunan sangatlah sulit dirasakan dampaknya bagi negara-negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Seperti halnya Indonesia. Permasalahan pembangunan di Indonesia masih menjadi masalah hingga sekarang. Keterbatasan sumber daya dan wilayah yang begitu luas menjadi faktor utama mengapa pembangunan di Indonesia kurang merata. Terlebih di Indonesia bagian timur. Pembangunan di Indonesia bagian timur sangatlah jauh dari kata merata jika dibandingkan Indonesia yang ada di bagian barat. Hal inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kurang merata dan tingkat penghasilan masyarakat juga mengalami ketertimpangan. Selain permasalahan itu, proses pembangunan yang belum merata juga mengakibatkan nilai jual barang atau kebutuhan pokok sangat mahal di Indonesia bagian timur. Permasalahan-permasalahan seperti ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat terselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa kendala yang dialami pemerintah pusat untuk melakukan proses pembangunan pada wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan letak geografis yang luas. Selain itu akses menuju ke tempat yang akan dilakukan proses pembangunan sangat sulit. Dan faktor selanjutnya adalah, pemerintah pusat kurang bersinergi dengan pemerintah-pemerintah daerah, khususnya dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia bagian timur. Beberapa faktor tersebut berdampak kepada kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia timur. Jika di perbandingkan dalam faktor apapun, masyarakat Indonesia bagian timur masih tertinggal di bandingkan masyarakat yang ada di Indonesia bagian barat. Masyarakat di Indonesia bagian timur juga menginginkan adanya pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, terminal,

bandara dan yang lain. Dengan adanya sarana publik seperti itu akan mempermudah masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya dan akan mendorong penghasilan masyarakat-masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur, khususnya yang berada di pulau Buru.

Salah satu pelabuhan yang sangat berdampak dalam pembangunan di Kabupaten Buru yang memiliki letak strategis dalam menunjang segala macam kebutuhan masyarakat baik dalam konteks mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang seharusnya baik untuk dikembangkan berdasarkan potensi perekonomian untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan Kabupaten Buru adalah Pelabuhan Rakyat. Pelabuhan Rakyat adalah pelabuhan yang terletak di Kabupaten Buru yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan adanya pelabuhan Rakyat tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan bagaimana infrastruktur pelabuhan dan bagaimana strategi pengembangan pembangunan pelabuhan untuk menunjang mobilisasinya. Pemerintah daerah juga harus memaksimalkan peraturan ataupun kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pembangunan Pelabuhan Rakyat. Implementasi tentang kebijakan pembangunan dari pemerintah harus jelas dan transparan, agar dapat mendukung kontribusi barang maupun jasa dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat<sup>3</sup>.

Secara geografis, Kabupaten Buru memiliki banyak wilayah perairan. Dalam mobilisasi penduduk ataupun dalam konteks distribusi barang dan lainnya, masyarakat di Kabupaten Buru sangat bergantung dengan adanya sebuah pelabuhan.

---

<sup>3</sup>Adris.A.Putra, Susanti Djalante, 2016, Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6 No.1.

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai yang sulit untuk dipisahkan dari suatu sistem transportasi maupun logistik. Oleh karena itu, dibutuhkan tata cara pengelolaan pelabuhan yang dilakukan secara profesional, maksimal efektif, efisien, dan terstruktur sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, cepat dan itu akan berdampak pada pola mobilisasi masyarakat Kabupaten Buru dan kegiatan kontribusi akan berjalan dengan maksimal. Selain peran pelabuhan peran dari adanya transportasi laut sangat penting dalam distribusi barang dan jasa di Indonesia dan pulau-pulau di Bagian Timur Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Buru. Untuk menunjang peran tersebut dibutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan dengan fasilitas yang mencukupi serta peran dari pemerintah daerah bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Buru.

Kabupaten Buru adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 46 tahun 1999 dan di perbarui dengan undang-undang nomor 06 tahun 2000. Dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintahan, sampai dengan awal tahun 2008 wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Selanjutnya, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka 5 wilayah kecamatan yang secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Buru terpisah menjadi wilayah otonom, yakni Kabupaten Buru Selatan. Namun pada akhir Tahun 2012 terjadi pemekaran 5 Kecamatan baru yang tertuang dalam Peraturan

Daerah No. 20,21,22,23 dan 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Teluk Kaiely dan Kecamatan Liliyaly, sehingga Kabupaten Buru menjadi 10 Kecamatan. Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Buaya, Batabual, Namlea, Waeapo, Waplau, Lolong Guba, Waelata, Fena Leisela, Teluk Kaiely dan Kecamatan Liliyaly.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru?
2. Faktor penghambat apa sajakah yang mempengaruhi Upaya Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang di paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa sajakah yang mempengaruhi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

---

<sup>4</sup> No Name, <http://burukab.go.id/index.php/> di akses Tanggal 2 Desember 2018, Selasa 13:00



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah pengetahuan ataupun wawasan dalam mengetahui “Upaya Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru”, Serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis selanjutnya yang meneliti hal yang sama ataupun berbeda serta lebih memperkaya kajian-kajian ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah Politik Pembangunan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur khususnya Infrastruktur pelabuhan di Kabupaten Buru.

## **E. Definisi Konsep**

Defenisi konseptual bertujuan untuk menguraikan tentang penjabaran beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu dalam rangka memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini. Maka perlu dilakukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan upaya untuk menyamakan pemahaman terhadap pokok pembahasan terhadap pengertian masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut. serta dapat memperoleh kejelasan arti dari penelitian ini, sehingga mempermudah dalam penelitian terhadap

variabel-variabel yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya. Maka penulis mengemukakan definisi konsep sebagai berikut.<sup>5</sup>

### **1. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buru**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia KBBI Upaya didefinisikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya diartikan sebagai usaha Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buru adalah mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk membangun infrastruktur pelabuhan rakyat untuk kepentingan masyarakat banyak dalam menunjang kehidupan masyarakat yang berada di pulau buru, pelabuhan rakyat dibahas bersama stake holder terkait (SKPD), yang berada dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru, antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Daerah, dan Dinas Perhubungan.

### **2. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah sebagai suatu konsep yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda. Menguraikan variabel kebijakan pemerintah haruslah diawali dari penguraian atas makna konsep kebijakan di satu sisi dan makna pemerintah di sisi lain, walaupun pada dasarnya

---

<sup>5</sup> Hamidi, 2010. Penelitian dan teori komunikasi, UMM Press, Hlm. 141.



kedua konsep memiliki makna yang sama walaupun dalam penerapan yang berbeda.<sup>6</sup>

Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>7</sup>

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintahan negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan dicapai (diatur) dimana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. H. Faried Ali, SH., MS., Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si., 2012. Studi Kebijakan Pemerintah, PT Refika Aditama, Hlm. 3

<sup>7</sup> Jurnal di akses di <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf> pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12:00 Wib.

dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aparatur negara/pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi negara, kebijakan kelembagaan negara dan pemerintah dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai negeri.<sup>8</sup>

### **3. Pelabuhan Rakyat**

Pelabuhan Rakyat adalah pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Buru untuk memudahkan masyarakat melakukan mobilisasi. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Rakyat juga bertujuan untuk memudahkan distribusi barang maupun jasa ke wilayah atau daerah lain yang berada di Kabupaten Buru. Pelabuhan Rakyat itu sendiri mulai dibangun pada tahun 2017 dan bertempat di Namlea. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang sentral dalam menunjang mobilisasi masyarakat maupun distribusi barang dan jasa di Kabupaten Buru. Dengan demikian, Pelabuhan Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Buru.

### **F. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional adalah sebuah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel yang diobsesi dapat diukur. Adapun variabel yang akan didefenisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.**

- a. Penelitian Pembangunan Pelabuhan Rakyat
- b. Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

---

<sup>8</sup> Ibid.

c. Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

d. Evaluasi Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

2. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

a. Anggaran Terhadap Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

b. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai.

c. Para Stake Holder yang Kurang Bersinergi Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru.

**G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari, menerangkan, ataupun menginterpretasi suatu kasus ataupun permasalahan dan dijelaskan dengan secara narasi dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Pendekatan studi kasus adalah salah satu jenis penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang empiris yang menyelidiki fenomena ataupun permasalahan dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan ciri-ciri pertanyaan how (bagaimana), Why (mengapa), dan what (apa).

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena ataupun permasalahan dengan secara narasi dan sedalam-dalamnya. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi ataupun banyaknya informan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari dan memahami

secara mendalam data-data yang diperoleh di lapangan. Artinya, penelitian ini bukan hanya untuk memperoleh data ataupun informasi yang diinginkan, melainkan peneliti juga ikut terjun langsung ke lapangan, seolah-olah peneliti juga ikut bergabung dalam kelompok ataupun masyarakat yang bersangkutan. Dan selanjutnya, setelah peneliti memperoleh data, data tersebut disimpulkan dan diambil data yang sama dengan fokus penelitian.<sup>9</sup>

## **H. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan Taylor dalam Lexy Moloeng, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses inquiri yang menyelidiki masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda. Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistic, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini para informan, dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi alamiah wajar.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Provinsi Maluku Utara. Peneliti menganalisis semua temuan data mengenai kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam kebijakan tersebut, kemudian memaparkan hasil analisis tersebut dalam pembahasan, hingga akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Pembangunan Pelabuhan Rakyat.

---

<sup>9</sup> Moloeng, Lexy J. 1994, Metodologi Penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm 5.

## **I. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah Suatu objek atau dokumen original, material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand-information”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.<sup>10</sup>

## **J. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.<sup>11</sup>

### **a. Observasi**

---

<sup>10</sup> Ibid. Hlm : 291

<sup>11</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, hlm. 164.

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan dan perasaan. Jadi observasi ini akan dilakukan langsung di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Perhubungan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Utara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung dan mendetail kepada peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru terkait pelabuhan rakyat.<sup>12</sup>

b. Wawancara

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diskonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur yang merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dan wawancara langsung kepada Subyek penelitian yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Perhubungan Kabupaten Buru.<sup>14</sup>

c. Dokumentasi

Dokumen disini meliputi bahan seperti: fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai

---

<sup>12</sup> Opcit, hlm 165.

<sup>13</sup> Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. Hal. 82

<sup>14</sup> Suharsimiarikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka cipta, Jakarta. Hlm. 133.

bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.<sup>15</sup>

## **K. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah individu, benda atau organisasi yang dilajadkan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti menetapkan para narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti dalam hal ini adalah upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, tiga orang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, dan tujuh orang masyarakat Kabupaten Buru.

## **L. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana-mana yang ingin diteliti untuk mendapatkan data-data serta informasi guna menunjang penelitian ini. Pentingnya lokasi penelitian ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Kantor Dinas Perhubungan.

---

<sup>15</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, hlm.199

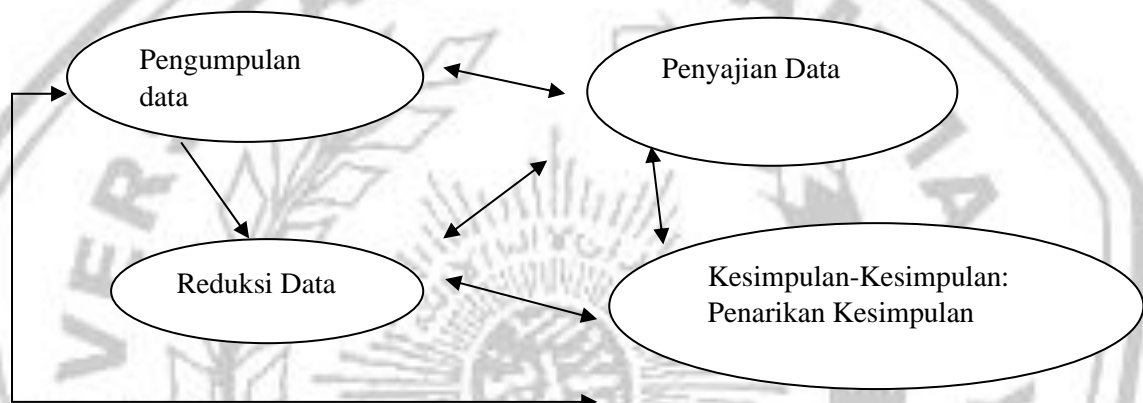
<sup>16</sup> Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal. 34



## M. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1986) menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Adapun analisis data meliputi:<sup>17</sup>

**Gambar 1.2** Model Analisis Interaktif: Miles dan Huberman <sup>18</sup>



## N. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menkode, menulis tema, membuat gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru akan dipilih-pilih sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan gambaran yang

<sup>17</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, hlm. 306.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 308.

lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mudah dalam penyajian data.<sup>19</sup>

## **O. Display Data**

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ditindak lanjuti untuk mencapai penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Pengambilan Keputusan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing-masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti sudah jelas. Kesimpulan ini sebagai hipotesa, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data. Sehingga data yang diperoleh

---

<sup>19</sup> Bungin, Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 341.

tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Buru, disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 345.